



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Sungai Moutong No. 8 Palu

Email : info@bawaslusulteng.com

Laman : www.sulteng.bawaslu.go.id

SIARAN PERS

PEMBAHASAN NPHD BAWASLU SULTENG

Palu, Bawaslu Sulteng - Peningkatan permohonan anggaran yang diajukan Bawaslu Sulteng untuk pembiayaan Pilkada jika dibandingkan dengan pembiayaan Pilkada tahun 2015 lalu, disebabkan beberapa hal. *Pertama*, struktur lembaga Pengawas Pemilihan 2015 hanya sampai PPL sedangkan pada Pemilihan 2020 mendatang terdapat Pengawas TPS. *Kedua*, besaran jumlah honor Pengawas Pemilu status Badan (Permanen) dan *ad hoc* yang disesuaikan dengan ketentuan. *Ketiga*, pelaksanaan kewenangan memutus sengketa, dan memutus pelanggaran administrasi. dan *Keempat*, fasilitasi Sentra Gakkumdu. Hal itu diuraikan Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen dalam rapat pembahasan anggaran Pilkada usulan Bawaslu Sulteng pada Rabu (6/11/2019) di ruang kerja Sekdaprov.

“Hasil rasionalisasi internal pengajuan anggaran Pilkada yang diajukan Bawaslu saat ini sebesar 97 milyar, guna dibahas bersama bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” terang Ruslan.

Pimpinan rapat Sekdaprov, Hidayat Lamakarate menegaskan bahwa besaran honor pengawas pemilihan yang bersifat *ad hoc* yang diajukan Bawaslu Provinsi harus sama dengan besaran honor pengawas *ad hoc* di Kabupaten/Kota yang lebih dahulu telah menandatangani NPHD.

“Kita akan melakukan pencermatan ulang dan persandingan permohonan pengajuan dengan perbandingan besaran NPHD Kabupaten/Kota yang telah disetujui”, terangnya.

Selain itu Hidayat menekankan standar pembiayaan anggaran pilkada disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan bukan mengacu kepada peraturan menteri keuangan. Hal itu karena standar yang diatur dalam peraturan menteri keuangan menggunakan standar tertinggi.

Dalam paparan rasionalisasi dihasilkan besaran sementara honor pengawas pemilu *ad hoc* sejumlah 28 miliar, dengan total anggaran hasil pembahasan sementara sebesar 77,2 miliar. Selanjutnya rapat pembahasan lanjutan akan dilaksanakan pada hari Jumat mendatang.

Rapat pembahasan di pimpinan Sekdaprov Hidayat Lamakarate. Turut hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulteng Ruslan Husen, Zatriawati, dan Kepala Sekretariat Annayanti Sovianita. Sementara itu dari unsur pemerintah daerah hadir Asisten Administrasi Umum dan Organisasi Mulyono, Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bahrn, Inspektur Inspektorat Daerah M. Muchlis, serta Kaban Kesbangpol Fahrudin.

Sebelumnya, delapan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulteng telah mencapai kesepakatan dan penandatanganan NPHD, yakni **Bawaslu Sigi** 9 miliar. **Bawaslu Touna** 8,7 miliar. **Bawaslu Toli-toli** 8.5 miliar. **Bawaslu Banggai** 15.8 miliar. **Bawaslu Banggai Laut** 10 miliar. **Bawaslu Morowali Utara** 10 miliar. **Bawaslu Palu** 8 miliar, dan **Kabupaten Poso** 12,2 miliar.

Tentang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum yang salah satu isinya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang saat itu bersifat *ad hoc* menjadi Badan permanen. Dalam perjalanannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertugas dan berwenang melakukan pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Informasi lebih lanjut, hubungi Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Twitter [@bawaslu_sulteng](https://twitter.com/bawaslu_sulteng), Instagram: [bawaslu.sulteng](https://www.instagram.com/bawaslu.sulteng), Fanpage Facebook: [bawaslu.sulteng](https://www.facebook.com/bawaslu.sulteng). Berkas dapat diunduh di website resmi : sulteng.bawaslu.go.id.